

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2019. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*, Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.
- Arini Nur Annisa. 2024. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Teori, Konsep, dan Pengujian*. Gowa: Subaltern.
- Ardiansyah. 2023. *Hukum Perizinan*. Yogyakarta: Deepublish
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra AdityaBakti.
- Benny Pasaribu, et. al. 2022, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Banten: Media Edu Pustaka.
- Fajlurrahman Jurdi. 2023. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana
- Joni Laksito dan Dyah Listyarini. 2024. *Hukum Perizinan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2020. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2016. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kadar Pamuji, et al. 2023. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: Unsoed Press.
- Muhamad Sadi Is dan Kun Budianto. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2023. *Buku Kajian: Evaluasi Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: MPR RI.
- Nandang Alamsah, et al. 2017. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*. Bandung: UNPAD Press.

- Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Sahya Angara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Satriya Nugraha. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- W. Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yonviter, et al. 2021, *Modul 1: Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut (MMPI5104)*. Jakarta: Universitas Terbuka

Jurnal

- Agus Setyawan, Parbuntian Sinaga, dan Teguh Satya Bakti. 2025. *Pengelolaan Pesisir Pasca UU Cipta Kerja: Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora. Volume 4 Nomor 4. 520–539. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i4.6592>
- Arini Nur Annisa, et al. 2024. *Urgensi Peraturan Kebijakan Dalam Pelayanan Migrasi Kerja Pada Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, 2(1), 37-70.
- Farida Patittingi, et al. 2022. *Program Strategi Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Desa Laikang, Kabupaten Takalar*. Panrita Abdi Jurnal Pengabdian pada Masyarakat. 6(2), 437-445.
- Grace Sharon. 2021 *Teori Wewenang Dalam Perizinan*. Jurnal Justiciabelen, 3(1):50-63. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2249>
- Hidayat Pratama Putra. 2023. *Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum Peratun, Volume 3 Nomor 1, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Kota Jayapura, Indonesia
- Muhammad Zulfan Hakim. 2011. *Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Hukum Islah, (29).
- Prihatiningtyas, W. 2019. *Pengelolaan Wilayah Laut Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance*. Media luris, 2(2), 279. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.14744>
- Shafa Jihan Anjani & Anggraeny Puspaningtyas. 2023. *Dampak Kondisi Lingkungan Pesisir Terhadap Sosial Ekonomi Penduduk Kenjeran Surabaya*. Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(1), 01–14. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.725>

- Sharon, G. 2020. *Teori wewenang dalam perizinan*. Jurnal Justiciabelen, 3(1), 50-63.
- Wahid, A. M., Naswar Bohari, dan Achmad, 2025. *Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan)*. Hasanuddin Law Review 1.1:61-73.

Skripsi, Disertasi, dan Tesis

- A. Ritha Wero W Guna. 2022. *Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Direktur Rsud Latemmamala Soppeng Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Hofifulloh. 2023. *Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Daerah Otonom Provinsi Banten)*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- Khelda Ayunita. 2020. *Reformulasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir di Sulawesi Selatan*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Miftahul J Saimima. 2023. *Keabsahan Tindakan Pemerintah Melakukan Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan Quarry Di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura
- Retno Galuh Tengga Utami. 2024. *Regulasi Perlindungan Dan Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Peraturan Perundang-Undangan

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023–2043
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011–2031
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut.

Website

- Anonim, 2025, "*Daftar 6 Pejabat yang Dicopot Nusron Buntut Kasus Pagar Laut*", CNN INDONESIA. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250130124131-92-1192701/daftar-6-pejabat-yang-dicopot-nusron-buntut-kasus-pagar-laut>. Diakses 23 September 2025
- Anonim, 2025, "*Konsep Kewenangan Atribusi, Mandat, dan Delegasi dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia: Perspektif Ahli Hukum*", Blogspot.com. <https://mahasiswahukum2025.blogspot.com/2025/03/konsep-kewenangan-atribusi-mandat-dan.html> Diakses 30 September 2025
- BBC News Indonesia, 2025, "*Sertifikat tanah membentang di laut Tangerang hingga Makassar - Bagaimana 'modus kecurangan' penerbitan sertifikat di pesisir?*", BBC.Com, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crr0n0r191ro> Diakses pada 26 November 2025
- Dema Amalia, dkk, 2025, "*Pagar Laut Dicabut, Apa Selanjutnya untuk Koreksi Kebijakan/Strategi Penataan Ruang ke Depan?*". ContemporaryPlanning.org. <https://contemporaryplanning.org/artikel-pagar-laut>

laut-dicabut-apa-selanjutnya-untuk-koreksi-kebijakan-strategi-penataan-ruang/ Diakses 15 Oktober 2025

- Darussalam J. S, 2025, "*Mengulas Temuan PKKPR Darat yang Terbit di Pagar Laut Tangerang usai JPU 'Endus' Suap dan Penyalahgunaan Wewenang*", Bantenhits.com <https://bantenhits.com/2025/04/17/mengulas-temuan-pkkpr-darat-yang-terbit-di-pagar-laut-tangerang-usai-jpu-endus-suap-dan-penyalahgunaan-wewenang/> diakses pada 29 November 2025
- Darussalam J.S. 2025. "*Blak-balakan! Jubir Menko AHY Ungkap Kenapa RTRW dan PKKPR Jadi Acuan Penting Terbitnya HGB Pagar Laut*". Bantenhits.com <https://bantenhits.com/2025/02/04/blak-balakan-jubir-menko-ahy-ungkap-kenapa-rtrw-dan-pkkpr-jadi-acuan-penting-saat-terbitnya-hgb-di-atas-laut/#:~:text=Dan%20itu%20juga%20yang%20mengeluarkan,Seluruhnya%20disebutkan%20sebanyak%20841%20titik> diakses pada 3 Desember 2025
- Darussalam J. S, 2025, "*Mayarakat Tangerang Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemkab Tangerang di Pagar laut*", Bantenhits.com <https://bantenhits.com/2025/04/14/masyarakat-tangerang-ungkap-dugaan-penyalahgunaan-wewenang-pejabat-pemkab-tangerang-di-pagar-laut/>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2024, "*Menteri Trenggono Sukses Optimalkan Potensi PNBP dari Ruang Laut*," Portal Resmi KKP, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. <https://kkp.go.id/news/news-detail/menteri-trenggono-sukses-optimalkan-potensi-pnbp-dari-ruang-laut-LZ9X.html> diakses 13 September 2025
- Lintang Catur Pratiwi, 2024, "*KKPRL sebagai Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut*", Surabaya: PT Primax Mitra Sakti. <https://primax.co.id/resources/kkpri-sebagai-izin-pemanfaatan-ruang-laut> Diakses pada 12 September 2025
- Liputan 6, 2025, "*Aktivis Pemerhati Korupsi Datangi KPK, Serahkan Dokumen Izin Tata Ruang Pembangunan Properti di Tangerang*," Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/amp/5904582/aktivis-pemerhati-korupsi-datangi-kpk-serahkan-dokumen-izin-tata-ruang-pembangunan-properti-di-tangerang> diakses pada 29 November 2025
- Luthfi Sulistyo, 2025, "*Tanggapi Isu Sertipikat di Kawasan Pagar Laut Milik Aguan Batal Dicabut, Menteri Nusron: Berita Itu Tidak Benar*", Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, <https://www.atrbpn.go.id/berita/tanggapi-isu-sertipikat-di-kawasan-pagar-laut-milik-aguan-batal-dicabut-menteri-nusron-berita-itu-tidak-benar#:~:text=Diketahui%2C%20dari%2080%20sertipikat%20tersebut%2C%20terdapat%2058,dan%20222%20sertipikat%20di%20luar%20garis%20pantai>

- Nanda Perdana Putra, 2025, "*Menteri KP Tegaskan Sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut Ilegal, Kok Bisa Terbit?*". Liputan6.Com <https://www.liputan6.com/news/read/5888883/menteri-kp-tegaskan-sertifikat-hgb-dan-shm-pagar-laut-ilegal-kok-bisa-terbit?page=2> diakses pada 25 November 2025
- Ombudsman Republik Indonesia, "*Ombudsman: Tuntaskan Pembongkaran Pagar Laut*" Siaran Pers Nomor 08/HM.01/II/2025, 3 Februari 2025, diakses pada 20 Februari 2026, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-tuntaskan-pembongkaran-pagar-laut>
- PRL DKP, 2022, "*PKKPRL*", Pengelolaan Ruang Laut | DKP SULTENG, <https://www.siperlu.dkp.sultengprov.go.id/page/pkkprl> diakses pada 28 November 2025
- Rizki Amana, 2025, "*Serahkan Dokumen Izin Tata Ruang Pembangunan Properti di Desa Kohod Kabupaten Tangerang, Aktivis Pemerhati Korupsi Desak KPK Lakukan Investigasi*", TV One News, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/295460-serahkan-dokumen-izin-tata-ruang-pembangunan-properti-di-desa-kohod-kabupateng-tangerang-aktivis-pemerhati-korupsi-desak-kpk-lakukan-investigasi>
- Sovia Hasanah, 2016, "*Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat*". Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertianatribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/> Diakses pada 30 September
- Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali. "*Asas Penataan Ruang*." <https://tarubali.baliprov.go.id/asas-penataan-ruang/> Diakses pada 3 Mei 2026.
- Vanessa, 2024, "*Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Perizinan Tambak Udang*", Jala.Tech. <https://jala.tech/id/blog/industri-udang/kkpri-dalam-perizinan-tambak-udang> Diakses pada 06 Oktober 2025
- Yusuf Permana, 2025, "*Dokumennya Dipalsukan, Ini Penjelasan Dinas Kelautan dan Perikanan Banten*", Radar.co.id, <https://www.radarbanten.co.id/2025/02/14/dokumennya-dipalsukan-ini-penjelasan-dinas-kelautan-dan-perikanan-banten/> Diakses pada 1 Desember 2025